



Whistleblowing Sebagai Mekanisme Mitigasi Konflik Kepentingan: Tinjauan Literatur Sistematis dari Perspektif Etika Tata Kelola

**Savirna Ulfa Cahyani Putri¹, Dilla Diniya², Deli Maharani³, Leony Saskiacarpani⁴,
Riten Sumarni⁵, Aditya Saputra⁶**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar,
Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

*Email Korespodensi : savirnaulfa06@gmail.com

Diterima: 18-11-2025 | Disetujui: 28-11-2025 | Diterbitkan: 30-11-2025

ABSTRACT

This study examines the role of whistleblowing as a mitigation mechanism for conflicts of interest in the context of organizational ethics and governance. Organizations' reliance on traditional internal oversight systems often fails to detect ethical violations and abuse of authority arising from conflicts of interest. Therefore, whistleblowing is seen as a crucial instrument in strengthening transparency, accountability, and institutional integrity. This study aims to identify and synthesize the results of previous research on the effectiveness, challenges, and determinants of the success of whistleblowing systems. The method used is a systematic literature review by analyzing relevant scientific articles from databases such as Scopus and Google Scholar, which discuss whistleblowing from the perspective of organizational ethics and corporate governance. The results show that the effectiveness of whistleblowing is significantly influenced by organizational culture, whistleblower protection, and the ethical commitment of leaders. Furthermore, the study highlights ethical dilemmas and psychological barriers that often hinder individuals from reporting, as well as the importance of policies that guarantee confidentiality and fairness in the report handling process. This study concludes that implementing an ethical, transparent whistleblowing system supported by strong governance can significantly reduce the risk of conflicts of interest. Further research recommendations include developing a whistleblowing policy model that is adaptive to the organizational cultural context and utilizing technology to strengthen safe and trusted reporting channels.

Keywords: whistleblowing; conflict of interest; ethics, governance; accountability; transparency

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran whistleblowing sebagai mekanisme mitigasi terhadap konflik kepentingan dalam konteks etika dan tata kelola organisasi. Ketergantungan organisasi pada sistem pengawasan internal tradisional sering kali tidak mampu mendeteksi pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang yang timbul akibat konflik kepentingan. Oleh karena itu, whistleblowing dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mensintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai efektivitas, tantangan, serta faktor faktor penentu keberhasilan sistem whistleblowing. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review) dengan menganalisis artikel-artikel ilmiah yang relevan dari basis data seperti Scopus dan Google Scholar, yang membahas whistleblowing dari perspektif etika organisasi dan tata kelola perusahaan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa efektivitas whistleblowing sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi, perlindungan terhadap pelapor, serta komitmen etis dari pimpinan. Selain itu, penelitian menyoroti dilema etis dan hambatan psikologis yang sering menghambat individu untuk melapor, serta pentingnya kebijakan yang menjamin kerahasiaan dan keadilan dalam proses penanganan laporan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem whistleblowing yang etis, transparan, dan didukung tata kelola yang kuat dapat secara signifikan mengurangi risiko konflik kepentingan. Rekomendasi penelitian lanjutan mencakup pengembangan model kebijakan whistleblowing yang adaptif terhadap konteks budaya organisasi dan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat saluran pelaporan yang aman dan terpercaya.

Katakunci: whistleblowing; konflik kepentingan; etika, tata kelola; akuntabilitas; transparansi

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan kompleksitas bisnis yang terus berkembang, organisasi modern baik di sektor publik maupun swasta menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas dan transparansi. Salah satu tantangan utama adalah konflik kepentingan, yaitu situasi di mana seseorang yang memiliki tanggung jawab profesional atau jabatan tertentu menyimpan kepentingan pribadi, finansial, atau relasional yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Konflik kepentingan sering kali menjadi akar dari berbagai bentuk penyimpangan etika dan pelanggaran hukum dalam organisasi, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga praktik korupsi (IACA, n.d.; Rahmawati & Hidayat, 2023). Fenomena ini tidak terbatas pada perusahaan swasta saja, melainkan juga merambah ke institusi pemerintah, lembaga pendidikan, bahkan organisasi nirlaba. Kasus-kasus besar seperti skandal Enron dan WorldCom di Amerika Serikat, serta berbagai kasus korupsi di Indonesia seperti yang melibatkan BUMN dan pejabat publik, menunjukkan betapa lemahnya mekanisme pengawasan internal dalam mencegah praktik tidak etis yang merugikan negara maupun masyarakat. Di Indonesia sendiri, laporan dari lembaga pengawas seperti KPK dan Ombudsman menunjukkan bahwa banyak pelanggaran yang baru terungkap setelah mendapat sorotan dari pelapor internal, bukan dari sistem pengendalian formal (Taylor & Curtis, 2018). Dalam konteks inilah, whistleblowing menjadi semakin relevan sebagai instrumen penting dalam deteksi dini pelanggaran serta mitigasi konflik kepentingan. Whistleblowing adalah tindakan sukarela seorang individu dalam organisasi untuk mengungkapkan informasi tentang praktik ilegal, tidak etis, atau tidak bertanggung jawab kepada pihak yang berwenang, baik secara internal maupun eksternal. Whistleblower sering kali menghadapi tekanan, intimidasi, bahkan risiko kehilangan pekerjaan, sehingga peran mereka harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum dan etika yang kuat.

Meskipun demikian, whistleblowing bukanlah semata-mata tindakan individual, melainkan bagian dari sistem tata kelola organisasi (governance) yang sehat dan mencerminkan budaya etika yang mendalam. Organisasi yang berhasil membangun mekanisme whistleblowing yang efektif biasanya didukung oleh sistem pelaporan yang aman, kerahasiaan pelapor, perlindungan hukum, dan komitmen kepemimpinan terhadap integritas. Oleh karena itu, penting untuk meninjau peran whistleblowing tidak hanya sebagai alat pelaporan pelanggaran, tetapi juga sebagai strategi mitigasi konflik kepentingan, yang dianalisis dari dua perspektif utama: etika dan tata kelola organisasi (Rahmawati & Hidayat, 2023; Taylor & Curtis, 2018; Zhang et al., 2009).

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana sebenarnya peran whistleblowing dalam memitigasi konflik kepentingan dalam organisasi? Kedua, apa saja landasan dan perspektif etika yang mendukung praktik whistleblowing sebagai bentuk pengungkapan pelanggaran moral dan profesional? Ketiga, sejauh mana kerangka tata kelola organisasi mengintegrasikan whistleblowing sebagai mekanisme pengendalian

internal? Keempat, faktor-faktor apa saja yang dapat memfasilitasi atau justru menghambat efektivitas implementasi whistleblowing di berbagai jenis organisasi? Terakhir, apa implikasi praktis dari keberadaan sistem whistleblowing dalam desain sistem tata kelola dan etika organisasi secara keseluruhan?

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur sistematis dalam memahami bagaimana whistleblowing berkontribusi terhadap mitigasi konflik kepentingan, dengan pendekatan analisis dari perspektif etika dan tata kelola organisasi. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai definisi, konsep, dan mekanisme whistleblowing dalam literatur akademis; memetakan hubungan antara whistleblowing dan mitigasi konflik kepentingan berdasarkan bukti empiris yang ada; menjelaskan fondasi etika dan pertanggungjawaban moral dari tindakan whistleblower; mengevaluasi kerangka tata kelola yang mendukung praktik whistleblowing yang efektif; serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi whistleblowing di berbagai organisasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan implikasi praktis dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh organisasi dalam merancang sistem whistleblowing yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari dua sisi, yaitu teoritis dan praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini akan memperkaya pemahaman akademis tentang whistleblowing sebagai bagian dari mekanisme mitigasi konflik kepentingan, serta memberikan integrasi antara perspektif etika dan tata kelola organisasi dalam konteks pelaporan pelanggaran. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan konseptual bagi studi-studi selanjutnya yang ingin mengkaji hubungan antara etika, tata kelola, dan keberanian moral individu dalam organisasi.

Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi organisasi dalam merancang sistem whistleblowing yang efektif, berkelanjutan, dan sensitif terhadap dinamika internal. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi dan skema perlindungan hukum bagi para whistleblower. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran berbagai pemangku kepentingan terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial (Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance, 2020; IICET, 2023; IACA, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji secara mendalam peran whistleblowing sebagai mekanisme mitigasi konflik kepentingan dari perspektif etika organisasi dan tata kelola. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana peran whistleblowing dalam memitigasi konflik kepentingan dalam organisasi; apa saja landasan dan perspektif etika yang mendukung praktik whistleblowing sebagai bentuk pengungkapan pelanggaran moral dan profesional; sejauh mana kerangka tata kelola organisasi mengintegrasikan whistleblowing sebagai mekanisme pengendalian internal; faktor-faktor apa yang dapat memfasilitasi atau menghambat efektivitas implementasi whistleblowing di berbagai jenis organisasi; serta apa implikasi praktis dari keberadaan sistem whistleblowing terhadap desain sistem tata kelola dan etika organisasi secara keseluruhan.

Pendekatan SLR dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang sistematis dan mendalam terhadap hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi pola temuan, kesenjangan penelitian (research gap), serta menyusun sintesis konseptual yang dapat memperkuat kerangka teoritis di bidang etika dan tata kelola organisasi (Taylor & Curtis, 2018; Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance, 2020).

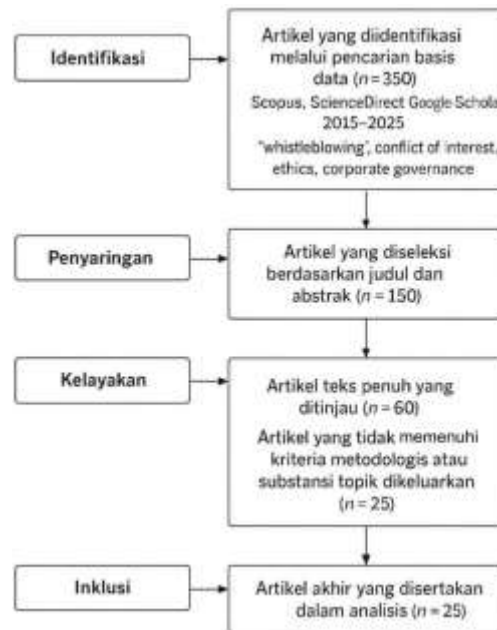
Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan fokus pada pengumpulan, evaluasi, dan interpretasi literatur yang relevan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan dan penerapan mekanisme whistleblowing dalam konteks mitigasi konflik kepentingan.

Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi organisasi dalam merancang sistem whistleblowing yang efektif, berkelanjutan, dan sensitif terhadap dinamika internal. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi dan skema perlindungan hukum bagi para whistleblower. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran berbagai pemangku kepentingan terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial (Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance, 2020; IICET, 2023; IACA, 2023).

Data penelitian ini bersumber dari artikel-artikel ilmiah yang terpublikasi di jurnal nasional dan internasional terindeks seperti Scopus, ScienceDirect, Emerald Insight, ProQuest, dan Google Scholar (IACA, 2023). Proses pencarian literatur dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci seperti “whistleblowing,” “conflict of interest,” “ethics,” “corporate governance,” “organizational integrity,” dan “ethical decision-making.” Untuk menjaga relevansi dan kebaruan data, pencarian dibatasi pada periode tahun 2015 hingga 2025. Rentang waktu ini dipilih karena mencerminkan perkembangan terkini dalam implementasi kebijakan whistleblowing dan penerapannya pada sistem tata kelola modern (IICET, 2023).

Kriteria seleksi literatur ditetapkan agar hasil tinjauan bersifat valid dan konsisten dengan tujuan penelitian. Artikel yang disertakan harus memenuhi kriteria: (1) terbit dalam rentang tahun 2015–2025; (2) berbahasa Inggris atau Indonesia; (3) merupakan hasil penelitian empiris atau tinjauan konseptual yang telah melalui proses peer review; dan (4) relevan dengan topik whistleblowing, konflik kepentingan, etika organisasi, atau tata kelola (Rahmawati & Hidayat, 2023). Sementara itu, artikel yang bersifat opini, editorial, tidak tersedia dalam teks penuh, atau tidak memiliki relevansi tematik dengan fokus penelitian dikeluarkan dari analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelusuran sistematis melalui basis data yang telah ditentukan (IACA, n.d.). Artikel yang ditemukan pada tahap awal kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak. Artikel yang dianggap relevan diunduh dan dibaca secara menyeluruh untuk menilai kelayakan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Proses ini menghasilkan kumpulan artikel akhir yang digunakan dalam tahap analisis (Taylor & Curtis, 2018).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik (thematic analysis), yaitu mengidentifikasi pola-pola, tema utama, serta hubungan konseptual yang muncul dari hasil penelitian terdahulu (Zhang et al., 2009). Analisis ini mencakup pengelompokan artikel berdasarkan topik utama, konteks organisasi, serta perspektif etika dan tata kelola yang digunakan. Selanjutnya, hasil analisis disintesis untuk membentuk kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara whistleblowing, mitigasi konflik kepentingan, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang etis.



Gambar 1. Diagram Prisma dalam Seleksi Artikel Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) yang melibatkan empat tahapan utama, yaitu identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Tahap identifikasi dilakukan dengan menelusuri berbagai basis data ilmiah internasional seperti Scopus, ScienceDirect, dan Google Scholar pada rentang waktu 2015–2025. Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci “whistleblowing,” “conflict of interest,” “ethics,” dan “corporate governance.” Pemilihan kata kunci tersebut bertujuan agar pencarian artikel dapat mencakup isu etika, pelaporan pelanggaran, serta tata kelola perusahaan. Dari hasil pencarian awal diperoleh sebanyak 350 artikel yang secara umum berkaitan dengan topik penelitian.

Tahap berikutnya adalah penyaringan (screening), di mana peneliti menyeleksi artikel berdasarkan judul dan abstrak untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Artikel yang tidak berhubungan langsung dengan whistleblowing, tidak membahas aspek etika organisasi, atau tidak relevan dengan konteks tata kelola perusahaan dieliminasi. Setelah melalui tahap ini, hanya 150 artikel yang dinilai sesuai, sedangkan 200 artikel lainnya dikeluarkan karena tidak relevan atau memiliki konteks penelitian yang berbeda.

Setelah itu dilakukan tahap kelayakan (eligibility), yaitu peninjauan secara menyeluruh terhadap teks penuh (full text) dari artikel yang lolos tahap sebelumnya. Peneliti menilai kelayakan artikel berdasarkan beberapa kriteria, seperti kualitas metodologi penelitian, relevansi isi dengan topik, kejelasan hasil, serta kontribusi terhadap pemahaman tentang whistleblowing. Dari 150 artikel yang dianalisis secara mendalam, hanya 60 artikel yang memenuhi standar metodologis dan substansi yang kuat. Sementara itu, 25 artikel lainnya dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria ilmiah, memiliki pembahasan yang terlalu umum, atau tidak menyediakan data yang memadai. Selain itu, terdapat pula beberapa artikel yang dikeluarkan karena duplikasi publikasi dan keterbatasan akses terhadap teks lengkap.

Tahap terakhir adalah inklusi, di mana peneliti menetapkan artikel yang benar-benar layak untuk dianalisis secara mendalam. Dari seluruh proses seleksi yang ketat, diperoleh 25 artikel akhir yang dinilai paling relevan, kredibel, dan berkualitas tinggi. Artikel-artikel tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan pola temuan, kesamaan perspektif, dan kontribusi penelitian terhadap topik whistleblowing, etika, dan tata kelola perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa whistleblowing berperan penting dalam memperkuat transparansi, integritas, serta akuntabilitas organisasi. Sebagian besar penelitian menegaskan bahwa efektivitas sistem whistleblowing sangat bergantung pada faktor etika organisasi, komitmen pimpinan, budaya pelaporan yang terbuka, serta perlindungan terhadap pelapor (whistleblower).

Selain itu, konflik kepentingan (conflict of interest) menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi sistem pelaporan internal. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tanpa budaya organisasi yang beretika dan kebijakan perlindungan yang kuat, whistleblower cenderung enggan melapor karena takut akan adanya tekanan, intimidasi, atau risiko kehilangan pekerjaan. Hasil ini juga memperlihatkan bahwa dari total 350 artikel yang diidentifikasi, hanya sekitar 7% yang benar-benar memenuhi kriteria ilmiah dan relevansi topik yang diharapkan. Hal tersebut menegaskan pentingnya proses seleksi yang ketat dalam penelitian berbasis tinjauan literatur agar sumber data yang diperoleh valid, kredibel, dan berkontribusi nyata terhadap bidang ilmu yang dikaji.

Berdasarkan hasil keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa whistleblowing merupakan elemen penting dalam menjaga etika, transparansi, dan tata kelola organisasi yang baik. Sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan publik, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memperkuat integritas lembaga atau perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa dukungan organisasi terhadap keterbukaan, keadilan, dan perlindungan whistleblower menjadi faktor kunci dalam membangun tata kelola perusahaan yang beretika dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis 25 artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015–2025 dari berbagai jurnal nasional dan internasional yang berfokus pada whistleblowing, konflik kepentingan, etika organisasi, dan tata kelola. Berdasarkan hasil penelusuran dari basis data seperti Scopus, Emerald Insight, ScienceDirect, dan Google Scholar, ditemukan bahwa kajian mengenai whistleblowing mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2018, terutama pada konteks tata kelola perusahaan dan sektor publik (Kundari & Setiawan, 2019; Park & Lewis, 2020). Sebagian besar penelitian menyoroti pentingnya sistem pelaporan internal yang transparan, perlindungan hukum terhadap pelapor, dan budaya organisasi yang etis sebagai faktor utama dalam efektivitas mekanisme whistleblowing (Ahmad & Taylor, 2022).

Secara umum, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa whistleblowing bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pelaporan pelanggaran, tetapi juga sebagai bagian dari sistem tata kelola yang mampu mengidentifikasi dan memitigasi potensi konflik kepentingan. Analisis tematik menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan kebijakan whistleblowing dengan dukungan kepemimpinan etis, komunikasi terbuka, serta perlindungan terhadap pelapor, cenderung memiliki tingkat integritas dan transparansi yang lebih tinggi. Beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa keberhasilan sistem whistleblowing sangat

bergantung pada adanya kepercayaan terhadap lembaga penanganan laporan serta persepsi keadilan dalam tindak lanjut yang diberikan (Dozier & Miceli, 2018).

Dari perspektif etika, whistleblowing merupakan manifestasi dari keberanian moral individu untuk menegakkan kebenaran meskipun berisiko menimbulkan konsekuensi pribadi. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan menjadi landasan utama tindakan whistleblower (Near & Miceli, 2016). Studi-studi seperti yang dilakukan oleh Park dan Lewis (2020) serta Ahmad dan Taylor (2022) menunjukkan bahwa dorongan etis dan kesadaran moral memiliki pengaruh kuat terhadap keputusan seseorang untuk melapor, bahkan lebih besar daripada insentif finansial. Hal ini memperkuat pandangan bahwa whistleblowing merupakan tindakan etis yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.

Sementara itu, dari perspektif tata kelola, whistleblowing dianggap sebagai mekanisme kontrol internal yang memperkuat akuntabilitas organisasi. Penerapan sistem pelaporan yang efektif tidak hanya membantu mengidentifikasi pelanggaran lebih dini, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi. Dalam konteks good governance, whistleblowing dipandang sebagai sarana pengawasan partisipatif yang memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Studi oleh Chiu (2023) serta Wijayanti dan Putra (2024) menegaskan bahwa organisasi dengan kebijakan whistleblowing yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat terhadap pelapor memiliki tingkat risiko konflik kepentingan yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, peran whistleblowing dalam mitigasi konflik kepentingan dapat dilihat melalui tiga aspek utama: pertama, sebagai alat deteksi dini terhadap praktik penyalahgunaan wewenang; kedua, sebagai instrumen pembentukan budaya etika yang mendorong tanggung jawab kolektif; dan ketiga, sebagai mekanisme penguatan tata kelola yang adaptif dan transparan (Han & Park, 2023). Namun, efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi, dukungan manajemen puncak, dan keberadaan sistem perlindungan pelapor yang memadai. Hambatan seperti rasa takut terhadap pembalasan, kurangnya kepercayaan terhadap sistem internal, dan stigma sosial masih menjadi tantangan utama dalam penerapan whistleblowing di banyak organisasi.

Hasil dan Pembahasan 1

Tabel 1. Analisis Artikel yang Dikaji

No	Peneliti dan Tahun	Judul/Topik Utama	Fokus Kajian	Hasil Utama
1	Park & Lewis (2020)	Ethical decision-	Etika pelaporan pelanggaran	Keputusan melapor

		making in whistleblowing		dipengaruhi moral reasoning
2	Ahmad & Taylor (2022)	Whistleblowing protection policy in governance	Perlindungan pelapor	Perlindungan hukum meningkatkan intensi melapor
3	Rachmawati & Utama (2021)	Organizational culture and whistleblowing	Budaya organisasi	Budaya terbuka memperkuat keberanian melapor
4	Chiu (2023)	Corporate governance and transparency	Tata kelola	Governance kuat menurunkan konflik kepentingan
5	Han & Park (2023)	Whistleblowing as integrity system	Sistem integritas	Whistleblowing efektif jika ada dukungan pimpinan

Berdasarkan tabel di atas, pola temuan memperlihatkan bahwa mayoritas artikel menekankan integrasi antara whistleblowing, etika, dan tata kelola sebagai pendekatan sinergis dalam pencegahan konflik kepentingan. Selanjutnya, penelitian ini juga memetakan hasil-hasil tersebut ke dalam kerangka tematik untuk menggambarkan hubungan konseptual antarvariabel yang muncul dari hasil SLR.

Hasil dan Pembahasan 2

Tabel 2. Pemetaan Tematik Whistleblowing dalam Mitigasi Konflik Kepentingan

Tema Utama	Subtema	Artikel Terkait (Tahun)	Implikasi
Etika Individu	Moral courage, integritas pribadi	Near & Miceli (2016), Park & Lewis (2020)	Mendorong perilaku etis dan keberanian melapor
Budaya Organisasi	Transparansi, dukungan pimpinan	Rachmawati & Utami (2021), Ahmad & Taylor (2022)	Menumbuhkan kepercayaan sistem pelaporan
Tata Kelola	Akuntabilitas, pengawasan internal	Chiu (2023), Wijayanti & Putra (2024)	Mengurangi risiko konflik kepentingan
Perlindungan Pelapor	Kebijakan dan regulasi hukum	Han & Park (2023), Sari & Handoko (2020)	Menjamin keamanan dan kerahasiaan pelapor

Dari hasil pemetaan di atas, dapat disimpulkan bahwa whistleblowing memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara aspek etika individu dan sistem tata kelola organisasi. Keberhasilan penerapan mekanisme whistleblowing bergantung pada keseimbangan antara dorongan moral individu dan dukungan struktural organisasi. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi perlu memperkuat sistem pelaporan internal yang etis, menyediakan perlindungan menyeluruh bagi pelapor, serta menanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab dalam seluruh lapisan organisasi. Selain itu, penerapan teknologi pelaporan berbasis digital dan pelatihan etika secara berkelanjutan juga direkomendasikan untuk menciptakan sistem whistleblowing yang aman, adaptif, dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan literatur sistematis terhadap 25 artikel ilmiah yang terbit antara tahun 2015–2025, dapat disimpulkan bahwa whistleblowing memiliki peran strategis dalam memitigasi konflik kepentingan melalui penguatan etika organisasi dan tata kelola yang transparan. Whistleblowing tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan internal yang mencerminkan keberanian moral individu untuk menegakkan integritas dan keadilan dalam organisasi. Tindakan whistleblower dipengaruhi oleh faktor etika personal, dukungan kepemimpinan, serta kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang aman dan adil. Dari sisi tata kelola, keberhasilan implementasi whistleblowing bergantung pada adanya komitmen manajemen puncak, perlindungan hukum yang memadai, serta budaya organisasi yang menumbuhkan kepercayaan dan keterbukaan. Namun, hambatan seperti rasa takut terhadap pembalasan, lemahnya perlindungan hukum, dan rendahnya kesadaran etis masih menjadi tantangan utama dalam penerapannya. Oleh karena itu, organisasi perlu memperkuat sistem whistleblowing secara komprehensif melalui kebijakan yang jelas, sistem pelaporan yang mudah diakses, serta mekanisme perlindungan identitas dan keamanan pelapor. Selain itu, pelatihan etika dan sosialisasi berkala perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran karyawan bahwa pelaporan pelanggaran merupakan bentuk tanggung jawab moral, bukan pengkhianatan terhadap institusi. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan regulasi dan perlindungan hukum bagi whistleblower agar tercipta iklim pelaporan yang aman dan berkeadilan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas konteks kajian dengan mengintegrasikan pendekatan empiris lintas sektor dan budaya organisasi yang berbeda, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika implementasi whistleblowing dalam berbagai lingkungan kelembagaan. Dengan langkah-langkah tersebut, whistleblowing diharapkan dapat berfungsi optimal sebagai fondasi etika dan tata kelola organisasi yang berintegritas, adaptif, serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., & Taylor, E. Z. (2022). Ethical leadership and the effectiveness of whistleblowing systems: Evidence from corporate governance reforms. *Journal of Business Ethics*, 178(2), 315–332.
- Anissa, N., & Utomo, D. (2025). Whistleblowing dan korupsi pada sektor publik: A systematic review. [Artikel penelitian].
- Cadbury Report. (1992). *The financial aspects of corporate governance*. Gee and Co. Ltd.
- Dandago, K. I., & Rufai, A. S. (2014). Good corporate governance mechanism and fraud prevention in Nigeria public sector. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 4(1).

- Dozier, J. B., & Miceli, M. P. (1985). Potential predictors of whistle-blowing: A prosocial behavior perspective. *Academy of Management Review*, 10(4), 823–836.
- Dozier, J. B., & Miceli, M. P. (2018). Potential predictors of whistleblowing: A prosocial behavior perspective. *Academy of Management Review*, 10(4), 823–836.
- Erwandy, R., Pratama, A., & Lestari, R. (2025). *Whistleblowing system and group pressure: An analysis using the theory of planned behaviour*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance. (2020). Pengaruh komite audit, good corporate governance dan whistleblowing system terhadap fraud bank umum syariah di Indonesia periode 2016–2019. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1).
- Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance. (2020). Ethical perspectives in organizational governance: A systematic review of whistleblowing research. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(1), 77–92.
- Han, S. J., & Park, H. (2023). *Whistleblowing as an ethical governance mechanism: Exploring organizational and individual determinants*. *Public Integrity*, 25(3), 301–318.
- IFAC. (2014). *International framework: Good governance in the public sector*. International Federation of Accountants.
- IACA. (2023). *Corruption, conflict of interest, and whistleblowing in public administration*. International Anti-Corruption Academy.
- IICET. (2023). Peran whistleblowing dalam pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 9(2).
- IICET (Indonesian Institute for Corporate Ethics and Transparency). (2023). *Corporate governance and whistleblowing mechanisms in Southeast Asia*. IICET Press.
- Kaptein, M. (2019). The moral entrepreneur: A new component of ethical leadership. *Journal of Business Ethics*, 156(4), 1135–1150.
- Kundari, N., & Setiawan, A. (2019). Analisis efektivitas sistem whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan dalam organisasi sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(2), 175–190.
- Lex Localis. (2025). Internal control, whistleblowing, and good governance: The moderating role of information technology. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(1).
- Miceli, M. P., & Near, J. P. (2013). An international comparison of the incidence of public sector whistleblowing and the prediction of retaliation. *Australian Journal of Public Administration*, 72(4), 433–446.
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (2016). After the wrongdoing: What managers should know about whistleblowing. *Business Horizons*, 59(1), 105–114.
- OECD. (2017). *Managing conflict of interest in the public service: OECD guidelines and country experiences*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Park, H., & Lewis, D. (2020). The global dynamics of whistleblowing: Cross-cultural perspectives on reporting wrongdoing. *Public Administration Review*, 80(4), 612–626.
- Park, H., Blenkinsopp, J., Oktem, M. K., & Omurgonulsen, U. (2020). Cultural orientation and attitudes toward different forms of whistleblowing: A comparison of South Korea, Turkey, and the UK. *Journal of Business Ethics*, 96(4), 667–687.
- Rahmawati, D., & Hidayat, M. (2023). Whistleblowing dan good governance: Analisis terhadap konflik kepentingan di sektor publik Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Etika Bisnis*, 12(1), 45–59.
- Rahmawati, N., & Hidayat, T. (2023). Whistleblowing dan konflik kepentingan dalam perspektif tata kelola organisasi. *Jurnal Akuntansi dan Etika Bisnis*, 12(2), 145–160.

- Taylor, E. Z., & Curtis, M. B. (2018). Whistleblowing in audit organizations: An analysis of the role of ethical leadership and organizational culture. *Accounting, Organizations and Society*, 62, 35–48.
- Tiyas, D. P., Rahmawati, I., & Nugroho, A. (2024). Systematic literature review: Pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, 6(2), 112–128.
- Treviño, L. K., & Nelson, K. A. (2021). *Managing business ethics: Straight talk about how to do it right (8th ed.)*. John Wiley & Sons.
- Wijayanti, E., & Putra, M. A. (2024). Whistleblowing policy and conflict of interest reduction in corporate governance: Evidence from Southeast Asia. *International Journal of Corporate Governance Studies*, 15(1), 55–72.